

Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung

Fitriyah¹, Laila Kholid Alfirdaus², Dzunuwanus Ghulam Manar³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Received: 22 Juni 2019

Revised: 19 Oktober 2019

Published: 27 April 2021

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik dalam pemilu sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS). Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, dimana makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu dianggap semakin legitimatif. Pemilih muda dan pemilih pemula dalam kajian partisipasi politik saat ini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuwan politik di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamikanya di lapangan, dan bagaimana para pemilih muda memiliki persepsi tentang kandidat dan pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda skeptis terhadap politik, pemilu dan kandidat, walaupun mereka bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program pendidikan politik dan masih memiliki harapan terhadap hasil pemilu yang transformatif.

Keywords:

partisipasi; pemilih muda; pemilu; pilkada serentak

Pendahuluan

Mengkaji partisipasi pemilih muda selalu menarik. Pasalnya, mereka dianggap masih awam dalam politik. Asumsi publik menyatakan, pemilih muda relatif apolitik, pasif, dan hanya peduli pada hal-hal yang sifatnya ekonomis-menghasilkan uang. Hal ini dikuatkan dengan beberapa rilis berita, dimana, mereka yang aktif berpolitik dalam sosial media adalah para generasi tua (generasi X). Hasilnya, pemilih muda jarang dirangkul, terlebih untuk masuk secara aktif ke ranah kontestasi politik. Kenyataannya, pemilih muda tidak buta politik. Mereka mengamati secara aktif politik praktis untuk menjadi dagar pengambilan sikap. Untuk itu, menelisik lebih lanjut kecenderungan perilaku politik

Korespondensi:

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Professor Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139.
Email: fitriyasemarang@yahoo.co.id

para pemilih muda menarik dilakukan, termasuk didalamnya pandangan mereka tentang politik, pemilu, hoaks, dan politik uang. Kajian ini memperlihatkan bahwa pemilih muda tidak selalu pasif, sebagaimana sering diasumsikan dalam berbagai diskusi akademik (Oyedemi & Mahlatji, 2016; Sheerin, 2007; Sigelman, 1982; Southwell, 2003).

Partisipasi politik dalam pemilu ada dalam beragam aktivitas. Namun, secara umum partisipasi politik lebih sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS) atau voting. Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, yang berlaku rumus makin tinggi tingkat partisipasi politik maka makin *legitimate* hasil pemilunya (Landemore, 2020). Ini karena akumulasi suara pemilihlah yang akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Pentingnya partisipasi politik dalam pemilu acapkali juga dikaitkan dengan derajat kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, sistem pemilu, penyelenggara pemilu dan hasil pemilu itu sendiri.

Dalam praktik kita pun partisipasi politik digunakan sebagai indikator keberhasilan pemilu, dalam konteks ini pula KPU sebagai penyelenggara pemilu menyusun target capaian partisipasi politik di setiap pemilu. Pemilu 2014 misalnya KPU yang mengacu pada RPJMN membuat target 75 persen, dan meningkat menjadi 77,5 persen untuk Pemilu 2019. Fenomena turunnya tingkat partisipasi politik dari pemilu ke pemilu menjadi alasan penguat dibuatnya target tersebut.

Data pemilu menunjukkan kecenderungan partisipasi politik yang menurun. Tingkat partisipasi politik dalam Pemilu 1955 mencapai 91,4 persen, pada Pemilu 1971 tingkat partisipasi pemilih 96,6 persen, Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 tingkat partisipasi politik 96,5 persen, pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik mencapai 96,4 persen, pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik mencapai 95,1 persen, pada Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik mencapai 93,6 persen. Data menunjukkan kecenderungan makin turunnya partisipasi politik di mulai sejak pemilu era reformasi. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih masih tinggi mencapai 92 persen, namun pada Pemilu 2004 turun menjadi 84 persen. Pada Pemilu 2009 tingkat partisipasi politik semakin menurun yaitu hanya mencapai 71 persen dan pada pada Pemilu 2014 berjumlah 72 persen atau tidak jauh berbeda dari pemilu 2009. Data yang menunjukkan makin menurunnya tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih.

Jumlah pemilih pada pemilu 2019 yang dirilis Kemendagri mencapai 196,5 juta orang, dari total pemilih terdapat sebesar 85 persennya adalah pemilih Pilkada Serentak 2018. Dari jumlah tersebut 55 persennya adalah pemilih muda (usia 17-38 tahun). Berdasarkan pada data komposisi pemilih, maka jumlah pemilih muda termasuk di dalamnya pemilih pemula, yakni kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, mereka ini usia antar 17-21 tahun

yang pada pemilu periode sebelumnya belum masuk usia pemilih, menjadi bermakna dalam menjadikan tujuan pemilu sebagai: (1) mekanisme penyeleksian dan pendelegasian kedaulatan rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercayai; (2) mekanisme pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin; (3) sarana mobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik; dan (4) sarana meyakinkan dan melibatkan individu anggota masyarakat dalam proses politik (Surbakti, 2010: 181-182), manakala pemilih muda berpartisipasi dalam pemilu dan hadir sebagai pemilih cerdas. Sayangnya tak jarang pemilih muda justru apatis untuk mengikuti pemilu atau bersikap cuek terhadap pemilu.

Jawa Tengah pada tanggal 27 Juni 2018 telah menggelar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, secara bersama pula ada tujuh kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada, dan pada tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak. Oleh sebab itu relevan untuk mengangkat isu tentang partisipasi pemilih muda yang merupakan pemilih dominan. Berdasar jumlah suara kaum muda inilah yang akan menentukan hasil pemilu. Hal lain, karakter pemilih muda ini lebih melek teknologi sehingga lebih banyak mengakses informasi melalui teknologi digital, mereka adalah pengguna media sosial dan melek informasi. Ini relevan dengan fakta bahwa media massa, baik media cetak, media elektronik dan media online memegang peranan penting dalam memengaruhi cara pikir, cara pandang, cara tindak dan sikap politik seseorang (Efriza, 2012: 38). Sejalan dengan uraian di atas, kepentingan tulisan dapat dilokalisasi pada bagaimana membaca arah partisipasi pemilih muda dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Telah pandangan pesimis terhadap pemilih muda dalam pemilu. Curtice (2002) misalnya melihat melihat ketertarikan pemilih muda terhadap politik makin memperlihatkan penurunan, dan bahkan ia menyebutnya sebagai fenomena krisis. Curtice (2002) mempertanyakan kemungkinan harapan baru bagi transformasi politik yang akan dipromosikan oleh kaum muda. Tetapi, Dabach, Fones, Merchant, & Kim (2017) melihat, kaum muda skeptis terhadap politik karena pengalaman-pengalaman masa lalu yang dilewatinya. Trauma, eksklusi dan berbagai kesulitan yang lain membentuk cara pandang kaum muda terhadap politik. Keraguan yang sama disampaikan oleh Garcia-Castanon, Garcia-Castañon, Rank, & Barreto (2011) bahwa era digital yang memberikan kesempatan luas pada kaum muda mengakses berbagai informasi politik belum tentu akan mendorong partisipasi aktif mereka di Pemilu. Untuk itu, penting melihat lebih jauh apakah keraguan yang sama terkonfirmasi didalam fenomena pemilih muda di Indonesia? Tulisan ini mengulik pemilih muda dalam Pilkada, dengan melacak cara pandang mereka terhadap politik, pemilu, politisi, hoaks, dan politik uang. Tulisan ini diharapkan memberikan gambaran lebih

jelas terkait dengan pemilih muda dan pemilu di Indonesia, yang selama ini cenderung mengajukan argumentasi skeptisisme yang sama.

Studi ini adalah penelitian survai dilakukan untuk mengukur arah partisipasi pemilih muda dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun & Effendi, 2019: 2). Populasi penelitian adalah siswa SMA Kabupaten Temanggung, jumlah sampel sebanyak 62 orang siswa dipilih secara random. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik penelusuran dokumentasi, media massa, hasil riset, buku, jurnal, dan laporan statistik. Data penelitian yang didapat diolah melalui sejumlah tahapan, yakni pemeriksaan data (editing), dilanjutkan dengan memberi kode (koding) dan tabulasi. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan statistik deskriptif.

Partisipasi Politik Sebuah Tinjauan Teoritik

Dalam negara demokrasi, partisipasi politik, yakni kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Surbakti, 2010: 140), merupakan hal penting. Asumsinya dalam negara demokrasi rakyat berdaulat, karenanya berhak terlibat memengaruhi keputusan politik yang menyangkut kepentingan dirinya. Partisipasi politik dibedakan atas partisipasi aktif, yakni berorientasi pada proses input dan output politik dan partisipasi pasif yang hanya berorientasi pada proses output. Di luar itu, ada kelompok apatis atau golongan putih (golput), yakni kelompok yang beranggapan masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan (Gatara & Said, 2007: 142-143; Surbakti, 2010: 318).

Milbrath dan Goel dalam Surbakti (2010) membuat kategori partisipasi politik atas empat kelompok, di mana tiga yang pertama yang menunjukkan tingkatan partisipasi. Pertama, kelompok apatis, yakni mereka yang tidak terlibat atau menarik diri dari proses politik. Kedua, kelompok spektator, yang meskipun kurang tertarik dengan politik namun masih menggunakan hak pilihnya. Ketiga, kelompok gladiator, yakni mereka yang sangat aktif di dalam politik termasuk kategori ini adalah aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis organisasi, dll. Keempat, pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk non-konvensional (Surbakti, 2010: 143).

Partisipasi politik terdiri dari bermacam-macam bentuk. Dikelompokkan atas partisipasi politik individual dan kolektif, yang kolektif dibagi lagi atas partisipasi yang konvensional seperti pemberian suara dalam pemilu (voting) dan aktivitas kampanye, dan partisipasi politik yang tidak konvensional (agresif) seperti demonstrasi dan kekerasan (Surbakti, 2010: 143). Partisipasi politik juga dibagi atas yang dilakukan dalam pemilu dan yang di luar pemilu.

Sejalan dengan itu partisipasi politik tidak hanya pemaknaan sempit dimaknai pemberian suara (voting) tapi juga yang derajatnya lebih tinggi karena memerlukan sumberdaya yang lebih dari pelakunya, seperti melakukan kampanye media untuk mendorong pemilih berpartisipasi dan untuk pengawalan pemilu yang bersih.

Pemilih muda termasuk didalamnya adalah pemilih pemula menarik untuk digarap baik oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun peserta pemilu (partai politik dan calon). Bagi KPU pemilih muda disasar guna disiapkan menjadi tipe pemilih cerdas, yakni rasional dan kritis, yang lebih mengedepankan pertimbangan logis, seperti mempertimbangkan apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, dalam membuat keputusan memilih (Firmanzah, 2007: 120). Sedangkan partai politik melihatnya sebagai pasar potensial sebagai ceruk suara. Namun yang juga patut dicermati, perilaku pemilih muda ini tidak lepas dari agen-agen sosialisasi. Secara umum sejumlah institusi dikenali sebagai agen sosialisasi, Damsar dalam (Efriza, 2012: 22) menyebutkan keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya dan media massa sebagai agen sosialisasi yang dipandang punya peranan penting. Sementara Efriza (2012: 22) menandai situs jejaring sosial sebagai agen sosialisasi baru. Ia menyebutkan agen sosialisasi terdiri atas keluarga, sekolah, kelompok bermain, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok-kelompok senggang, media massa, situs jejaring, dan kontak-kontak langsung. Sejumlah agen yang disebut relevan dengan pemilih muda, misalnya Sardini (2015) menyebut ada hubungan antara perilaku pemilih pemuda dengan orang tua mereka.

Sesuai era kekinian situs jejaring sosial berperan memengaruhi partisipasi politik pemilih muda. Sejumlah studi partisipasi politik pada kelompok pemilih muda menemukan faktor-faktor pendorong partisipasi politik mereka. Kenski & Stroud (2006) menemukan hubungan antara akses internet dan paparan online terhadap informasi tentang kampanye presiden dan efikasi, pengetahuan, dan partisipasi politik. Zimmerman (1989) meneliti hubungan antara efikasi politik dan partisipasi politik. Sedangkan studi Fitriyah (2014) menemukan nilai personal (personal values) dan efikasi politik internal (*internal political efficacy*) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik mahasiswa pemilih pemula. Kata lain, tanpa rasa efikasi politik, pemilih muda kemungkinan akan menjadi apatis, acuh tak acuh terhadap proses politik yang terjadi. Selanjutnya studi Pasek, Feldman, Romer, & Jamieson (2008) yang menggunakan desain kuasi-eksperimental untuk menguji efek jangka panjang dari program suara siswa (*student voices*) pada siswa sekolah menengah umum di Philadelphia selama tahun ajaran 2002-2003 dan setelah Pemilu Presiden 2004, para peneliti menghubungi kembali para siswa tersebut hasilnya menunjukkan siswa yang berpartisipasi dalam dua semester dari program tersebut punya efikasi politik yang lebih besar untuk partisipasi politik dan punya efek pada peningkatan perhatian dan pengetahuan politik mereka tentang kontestan.

Partisipasi Politik Kaum Muda

Studi tentang partisipasi politik pemilih muda ini menyoar pada siswa SMA di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada Pilkada Serentak 2018 Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten yang menggelar pilkada serentak di Jawa Tengah bersama Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Banyumas. Kabupaten Temanggung mencatat rekor dalam angka partisipasi di wilayah Jawa Tengah. Sejak pemilu 1999 sampai sekarang angka partisipasinya selalu di atas 80%, sementara di kabupaten/Kota di Jawa Tengah capaiannya di bawah 80%. Tingginya angka partisipasi politik ini di satu sisi patut diapresiasi karena memberi gambaran rakyat terlibat dalam pemilu, namun di sisi lain voter *turn-out* baru sebatas menggambarkan wajah permukaan dari konsep partisipasi politik itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan di atas konsep partisipasi politik menunjuk pada ragam bentuk yang membentuk piramida, di mana voting adalah aktivitas tertendah. Oleh karena itu juga menjadi penting untuk mengajak pemilih terlibat dalam pemilu bukan sebatas voting atau hadir di TPS tetapi juga ikut mengawal pemilu bersih. Dalam konteks ini pemilih muda, khususnya pemilih pemula adalah target potensial untuk dilibatkan.

Mengapa pemilih muda penting?. Ada sejumlah keunggulan komparatif pada kelompok pemilih muda. Mereka adalah pemilih yang secara psikologis memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok pemilih lainnya yang dewasa. Misalnya mereka mandiri, kritis, anti status quo dan menginginkan perubahan dan sebagainya. Ciri-ciri ini cocok dengan karakteristik pemilih cerdas, yakni kelompok pemilih yang punya pertimbangan rasional dan kritis dalam menentukan pilihannya. Pemilih jenis ini akan berhitung tentang siapa kandidat, bagaimana *track-record*-nya dan apa program kerja yang ditawarkan. Karenanya pemilih muda lebih mudah untuk diajak serta punya sikap antipolitik uang dan anti berita bohong (hoaks). Namun pada sisi lain, kelompok ini juga berpotensi golput, mereka cenderung cuek melihat pemilu. Sikap cuek ini terutama mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang kandidat atau partai politik peserta pemilu.

Studi ini menggunakan 62 orang responden siswa SMA. Profil responden, sebesar 53 persen berjenis kelamin laki-laki dan 47 persen perempuan. Mayoritas (95%) adalah muslim, mayoritas (52%) dari keluarga berpenghasilan di bawah 1 juta per bulan, mayoritas (80%) punya orang tua yang utuh, dan mayoritas (58%) dengan latar belakang pendidikan orang tua mereka hanya tamat SMP. Secara umum mayoritas responden dari keluarga sederhana, namun mereka dibesarkan oleh keluarga yang harmonis. Semua responden tergolong aktif, di mana semua responden punya aktivitas ekstra-sekolah, mayoritas responden (71%) aktif dalam kegiatan OSIS/Pramuka/PKS/PMR di sekolah, sisanya aktif di kegiatan olah raga, musik, agama (rohis) dan karang taruna.

Terkait partisipasi politik mereka, temuan lapangan menunjukkan bahwa minat mereka terhadap pemilu tinggi, di mana mayoritas (84%) responden mengatakan akan menggunakan hak pilih di TPS pada hari pemungutan suara. Temuan ini menkonfirmasi studi Efriza (2012: 31) yang menemukan pola keluarga harmonis menyebabkan responden bersikap partisipan dalam aktivitas politik. Namun yang menarik mayoritas (71 %) responden belum tahu nama-nama calon yang berkontestasi dalam pilkada, mereka juga mengaku belum tahu cara mencoblos agar surat suaranya sah. Hal ini dikatakan oleh 67,7 persen responden. Data ini menunjukkan jika minat mereka yang tinggi untuk berpartisipasi belum diimbangi dengan pengetahuan tentang siapa calon dan bagaimana cara memastikan agar suaranya sah untuk diakumulasi sebagai dasar penentuan pemenang pemilunya. Terhadap kekurangan pengetahuan semacam itu sosialisasi pemilu, khususnya oleh KPU, yang lebih masif diperlukan.

Studi ini juga mencatat bahwa pemilih muda masih bergantung pada banyak pihak dalam membuat keputusan memilih calon. Di urutan pertama adalah tokoh agama (93%), diikuti oleh orang tua (90%) dan teman (74%) yang akan menjadi rujukan mereka dalam pertimbangan memilih. Menyimak temuan ini, sosialisasi pemilu kepada pemilih muda bisa langsung kepada pemilih muda yang bersangkutan namun bisa juga melalui tokoh agama, dalam konteks ini penyelenggara pemilu bisa membangun sinergi dengan tokoh agama untuk terlibat sebagai agen sosialisasi. Memberi peran sebagai agen sosialisasi pemilu kepada tokoh agama juga lebih mudah dilakukan karena sejatinya peran sebagai agen sosialisasi oleh kelompok agama di Indonesia sudah terinstitusionalisasi. Selain itu, meski pendapat orang tua juga menjadi rujukan responden ketika kelak mengambil keputusan dalam memilih, namun jika melihat latar belakang pendidikan orang tua responden yang mayoritas hanya tamat SMP dimungkinkan transformasi pengetahuan politik ini tidak optimal.

Selain memertimbangkan saran dari orang dewasa di sekitarnya, pemilih muda memanfaatkan informasi dari sosial media dalam menentukan pilihan. Mayoritas responden (94%) mengaku akan menggunakan informasi dari media sosial sebagai dasar pertimbangan keputusan memilih. Kata lain, media sosial adalah institusi yang dipercaya oleh pemilih muda. Sebagaimana Efriza (2012: 22) yang menandai situs jejaring sosial sebagai agen sosialisasi baru, studi ini juga menunjukkan peran media sosial sebagai sarana informasi bagi pemilih muda penting. Sebanyak 64 persen responden mengatakan akan mengikuti diskusi soal pemilu dari media sosial, meski demikian posisi media sosial ini sebagai sumber informasi belum menggantikan ataupun menggeser peran media massa cetak dan elektronik, di mana 95 persen responden mengaku akan menggunakan media massa ini untuk mengikuti diskusi soal pemilu. Artinya, posisi media sosial saat ini sebagai pelengkap media massa konvensional.

Sejumlah studi menemukan adanya hubungan antara efikasi politik, atau rasa berperan dalam pemilu dan partisipasi politik. Studi ini juga menunjukkan pemilih

muda punya tanggung jawab akan peran dirinya dalam pemilu. Sebanyak 55 persen responden memaknai pemilu sebagai hak warga negara dan 44 persen memaknainya sebagai kewajiban warga negara, hanya sebesar 1 persen yang tidak tahu makna pemilu baginya. Oleh sebab itu mayoritas (89%) responden ketika dihadapkan pilihan pada dua aktivitas yang bersamaan antara menonton *broadcast youtube* para cagub/partai pengusung ataukah menonton “KTalk”-nya Awkarin di Youtube, mereka memilih yang pertama. Pola yang sama ditemukan pada pilihan ikuti diskusi pemilu ataukah mengikuti postingan “Lambe Turah” di media sosial, mayoritas (99%) memilih ikuti diskusi.

Akhirnya yang masih belum menggembirakan adalah terdapatnya 33 persen responden yang masih toleran dengan politik uang meski tidak memengaruhi keputusan dalam memilih, mereka mengaku akan menerima pemberian uang namun tetap memilih calon yang sejak mula menjadi pilihan. Berita baiknya yang menolak politik uang ada dalam jumlah mayoritas, bahkan tidak hanya menolak uangnya namun juga akan menolak calonnya, sebagaimana dikatakan oleh 67 persen responden bahwa mereka menolak politik uang dan memilih calon yang tidak memberi. Terkait hoaks semua responden punya sikap anti-hoaks dan mayoritas (77%) mengatakan jarang *me-like*, *men-share* atau *comment* tautan berita yang dibagikan teman. Ini adalah berita baik.

Hal ini mengkonfirmasi Lam-Knott dan Cheng (2020) bahwa tidak selamanya politik yang berkaitan dengan kaum muda adalah tentang pesimisme. Bagaimanapun, para pemilih muda masih memberikan harapan bagi transformasi politik yang lebih baik. Dalam konteks Temanggung, dan Indonesia pada umumnya, tantangan memang masih jelas di depan mata, khususnya yang terkait dengan politik uang. Pendekatan dan pendidikan politik dibutuhkan untuk mendorong partisipasi pemilih muda yang jujur, rasional dan demokratis.

Kesimpulan

Bonus demografi yang di tahun politik yang ditandai dengan hadirnya pemilih muda secara signifikan berdasar kajian studi ini menunjukkan arah positif bagi praktik demokrasi pemilu di Indonesia. Pemilih muda adalah pemilih dominan dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dan karenanya suara mereka menentukan. Studi ini menunjukkan adanya antusiasme pemilih muda untuk menggunakan hak pilih di TPS kuat namun belum diimbangi dengan tingkat pengetahuan yang cukup untuk menjadikan mereka sebagai pemilih cerdas. Oleh sebab itu peran penyelenggara pemilu untuk lebih memberi perhatian pada kategori pemilih muda diperlukan. Dalam hal ini terdapat sejumlah agen sosialisasi yang sesuai kebutuhan mereka, dalam bentuk kontak personal sebagai agen adalah tokoh agama dan agen berikutnya untuk sosialisasi adalah media massa. Studi ini juga menemukan media sosial sebagai agen sosialisasi baru yang juga dipercaya oleh pemilih muda. Posisi media sosial saat ini sebagai pelengkap media massa cetak dan elektronik.

Terakhir, terkait dengan politik uang dan hoaks yang keduanya mereduksi kualitas demokrasi pemilu, sikap pemilih muda atas hoaks jelas, mereka menolak atau anti-hoaks, namun untuk politik uang, meski minoritas, masih didapati pemilih yang punya sikap toleran atas politik uang meski tidak menentukan pilihan. Temuan ini kiranya menjadi cacatan penting bagi kita semua.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada kolega penulis di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro yang telah berbagi diskusi dan catatan kritisnya sehingga artikel ini bisa dibaca seperti saat ini. Apresiasi khususnya disampaikan kepada tim peneliti CEPP (*Center for Election and Political Party*), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan atas pembiayaan dari Kantor Kesbang Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh CEPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Daftar Pustaka

- Cochrane, J. (2013). Multinationals Hasten to Invest in Indonesia. Retrieved from <http://www.nytimes.com/2013/04/24/business/global/indonesia-sees-foreign-investment-surge.html?mcubz=3>
- Curtice, J. (2002). The State of Election Studies: Mid-Life Crisis or New Youth? *Electoral Studies*, 21(2), 161–168.
- Dabach, D. B., Fones, A., Merchant, N. H., & Kim, M. J. (2017). Discourses of Exclusion: Immigrant-Origin Youth Responses to Immigration Debates in An Election Year. *Journal of Language, Identity & Education*, 16(1), 1–16.
- Efriza, P. E. (2012). Sebuah Kajian Ilmu Politik. *Bandung: Alfabeta*.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Garcia-Castañón, M., Rank, A. D., & Barreto, M. A. (2011). Plugged In or Tuned out? Youth, Race, and Internet Usage in the 2008 Election. *Journal of Political Marketing*, 10(1–2), 115–138.
- Gatara, S., & Said, M. D. (2007). Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Kenski, K., & Stroud, N. J. (2006). Connections Between Internet use and Political Efficacy, Knowledge, and Participation. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 50(2), 173–192.
- Landemore, H. (2020). *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*. Princeton: Princeton University Press
- Nizamuddin, A. M. (2008). Declining Risk, Market Liberalization and State-Multinational Bargaining: Japanese Automobile Investments in India, Indonesia

- and Malaysia. *Pacific Affairs*, 81(3), 339–359.
- Oyedemi, T., & Mahlatji, D. (2016). The 'Born-Free' Non-Voting Youth: A Study of Voter Apathy Among a Selected Cohort of South African Youth. *Politikon*, 43(3), 311–323.
- Pasek, J., Feldman, L., Romer, D., & Jamieson, K. H. (2008). Schools as Incubators of Democratic Participation: Building Long-Term Political Efficacy With Civic Education. *Applied Development Science*, 12(1), 26–37.
- Sardini, N. H. (2015). Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 59–82. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/792>
- Sheerin, C. A. (2007). Political Efficacy and Youth Non-Voting: A Qualitative Investigation into the Attitudes and Experiences of Young Voters and Non-Voters in New Zealand.
- Sigelman, L. (1982). The Nonvoting Voter in Voting Research. *American Journal of Political Science*, 47–56.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2019). Metode Penelitian Survei.
- Southwell, P. L. (2003). The Politics of Alienation: Nonvoting and Support for Third-Party Candidates Among 18–30-Year-Olds. *The Social Science Journal*, 40(1), 99–107.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Grasindo.
- White, N. J. (2017). The Settlement of Decolonization and Post-Colonial Economic Development: Indonesia, Malaysia, and Singapore Compared. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 173(2–3), 208–241.
- Zimmerman, M. A. (1989). The Relationship Between Political Efficacy and Citizen Participation: Construct validation studies. *Journal of Personality Assessment*, 53(3), 554–566.

Tentang Penulis

Fitriyah adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar partai politik, pemilu, dan politik gender.

Laila Kholid Alfirdaus adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset analisis kebijakan publik, politik gender dan evaluasi kebijakan.

Dzunuwanus Ghulam Manar dosen Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset pemerintahan daerah dan inovasi kebijakan pemerintahan.